

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan adanya penyempurnaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan perencanaan di tingkat pusat dan daerah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, Kepala BAPPEDA mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RKPD menggunakan rancangan Renja Perangkat Daerah dengan Kepala Perangkat Daerah, sedangkan RKPD dijadikan dasar Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA).

Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah; dan
2. Tahap penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah;

4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
5. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
6. Perumusan tujuan dan sasaran;
7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
8. Perumusan kegiatan prioritas;
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah;

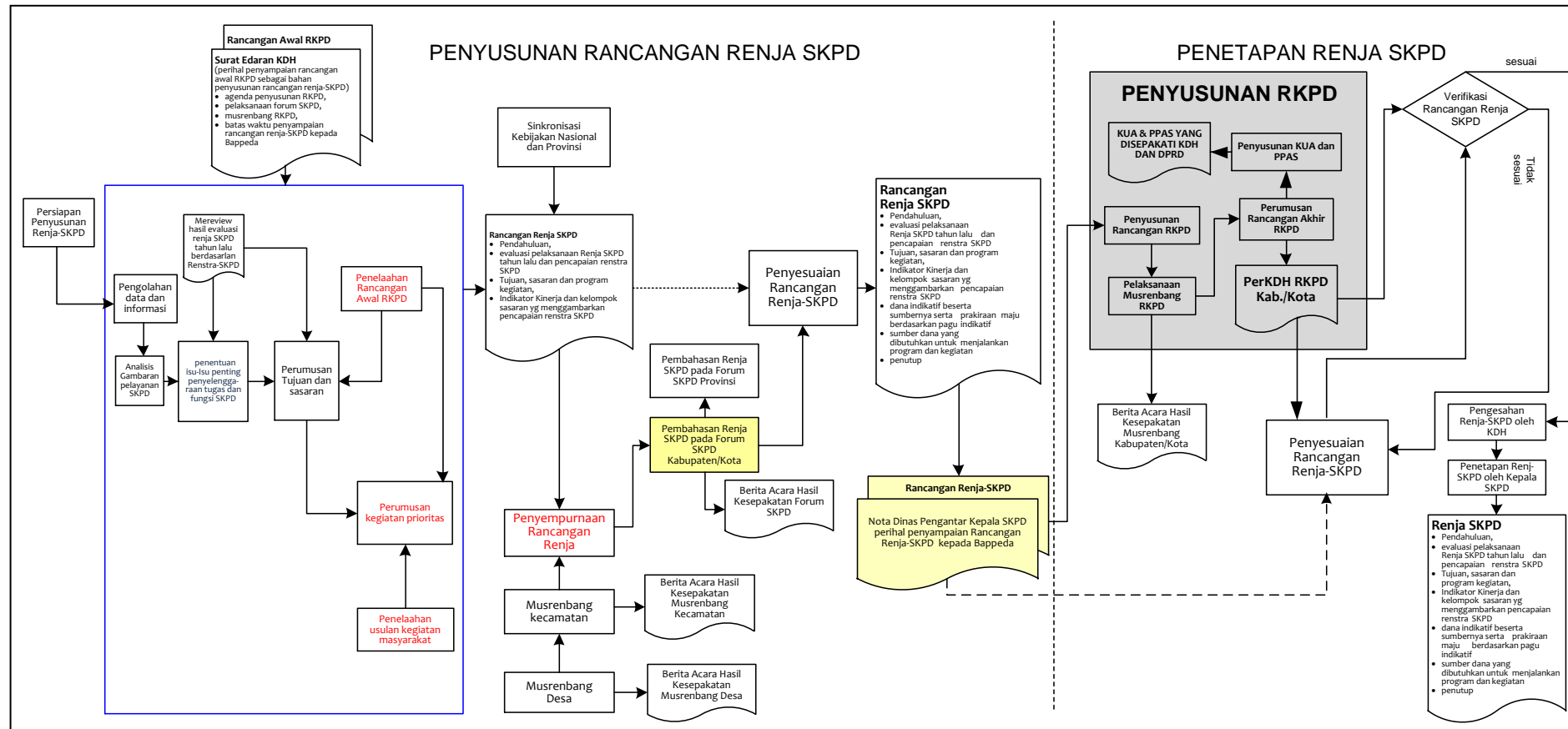
Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Rancangan Renja Perangkat Daerah, mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, yang menyangkut aspek:

1. Kondisi pelayanan Perangkat Daerah;
2. Organisasi dan tatalaksana Perangkat Daerah;
3. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya;
4. Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah;
5. Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
6. Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah;
7. Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Perangkat Daerah;
8. Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
9. Rancangan awal RKPD tahun rencana;
10. Informasi lain terkait pelayanan Perangkat Daerah.

Secara rinci bagan alir tahapan penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana digambarkan pada skema tahapan bagan alir penyusunan Renja Perangkat Daerah pada Gambar 1.1.

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Permenkes 43 tahun 2016 dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa



1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendali dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Urusan Wajib Bidang Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
23. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
24. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/kota;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa Tahun 2008 – 2028;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa
27. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
28. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2021.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan kesehatan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama setahun

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kesehatan adalah :

1. Melakukan evaluasi terhadap capaian rencana kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian rencana strategis (Renstra).

2. Melakukan analisis terhadap pelayanan kesehatan di Kabupaten Minahasa terhadap Indikator Kinerja Utama, Indikator SPM dan Indikator IKK
3. Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa pada tahun 2019.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tahun 2020 sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana kerja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa s/d Tahun 2020 (tahun berjalan)* adalah sebagaimana tersebut dibawah.

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

- Angka Kematian Ibu, target 20,56/100.000 KH capaian 150,15/100.000 KH
- Cakupan Desa UCI, target 93% capaian 86,36%
- Akreditasi Puskesmas, belum dilaksanakan
- Cakupan *Universal Health Coverage*, target 100%, capaian 73%
- Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan, target 100% capaian 98,28%
- Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan, target 100%, capaian 92,89%
- Persentase Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi baru lahir, target 100%, capaian 91,34%
- Cakupan D/S, target 92%, capaian 41,4%
- Cakupan kelurahan/desa siaga aktif, target 70% capaian 12,59%
- Jumlah desa/kelurahan Pemicuan STBM, target 189 desa/kelurahan capaian 173 desa/kelurahan
- Cakupan penduduk terhadap air bersih, target 91% capaian 89,76
- Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar, target 100% capaian 40,89%
- Persentase kecamatan yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap bayi, target 100% capaian 88%
- Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar, target 100% capaian 58,96%
- Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan Kesehatan TBC sesuai standar, target 100% capaian 29,6%
- Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar, target 100% capaian 96,61%

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

- Angka Kematian Bayi, target 4,7/1.000 KH capaian 1,5/1.000 KH (lebih kecil capaian, lebih baik)
- Prevalensi Stunting, target 14% capaian 3,11%
- Cakupan Balita gizi buruk, 0
- Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita, target 16,50% capaian 1,24%
- Rumah tangga PHBS, target 68,2% capaian 71,80%
- Puskesmas yang melayani pasien penduduk miskin peserta program jemkesmas, target 22 pkm, capaian 22 Puskesmas
- Tersedia MoU BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan, target 1 dok, capaian 1 dok.
- Puskesmas yang telah dilatih Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), target 22 Puskesmas, capaian 22 Puskesmas
- Puskesmas yang telah melaksanakan manajemen Puskesmas, target 22 Pkm, capaian 22 Pkm.
- Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam, target 100% capaian 100%.
- Cakupan puskesmas dan jaringannya yang memiliki sumberdaya Kesehatan yang berkompeten sesuai standar, target 22 Pkm capaian 22 PKm
- Jumlah Puksemas yang memiliki minimal 5 jenis tenaga kesehatan, target 22 Pkm capaian 22 Pkm

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

- Persentase desa yang memanfaatkan dana desa untuk UKBM, target 66,1% capaian 78%
- Jumlah kecamatan yang memiliki Puskesmas dan jaringannya, target 22 Kecamatan capaian 23 kecamatan
- Jumlah fasilitas pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana Kesehatan (RS) di Kab/Kota, target 1 RS capaian 5 RS
- Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar, target 100%, capaian 118,58%

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program / kegiatan antara lain :

- a. Masih kurang matangnya dalam penyusunan perencanaan untuk rencana kerja 5 tahunan sehingga target kinerja tahunan tidak dapat dicapai sesuai harapan.
- b. Masih terdapat kekeliruan dalam menetapkan target kinerja sehingga terdapat beberapa kegiatan yang tidak bisa mencapai target kinerjanya.
- c. Masih terdapatnya keterbatasan tenaga dan anggaran pada beberapa kegiatan sehingga tidak semua target yang direncanakan dapat dilaksanakan
- d. Masih lemahnya koordinasi lintas program dalam pelaksanaan kegiatan yang bisa disandingkan pada saat yang bersamaan, sehingga waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan, misalnya pada pelaksanaan pertemuan atau sosialisasi program.
- e. Terjadinya pandemi covid-19 pada awal tahun 2020

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program / kegiatan antara lain:

Terdapat kesesuaian antara rencana yang disusun pada Renstra dengan apa yang direncanakan pada Renja dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Faktor-faktor penyebab target kinerja program / kegiatan yang melebihi target antara lain:

Merupakan kegiatan yang sangat banyak dibutuhkan seperti pelatihan dan diklat, serta melakukan promosi di bidang kesehatan

5. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Ada beberapa program yang tidak tercapai target kinerja program dan ini berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA. Pada bagian lain, ada beberapa program yang mencapai target dan berimplikasi positif terhadap status kesehatan masyarakat yang

semakin baik, selain itu pencapaian beberapa target Renstra menunjukkan pembangunan kesehatan berjalan dengan baik.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab antara lain:
 - a. Sosialisasi Program dan kegiatan ke masyarakat yang lebih optimal.
 - b. Advokasi ke Stakeholder, karena pembangunan kesehatan dapat berjalan dengan baik bila ada koordinasi dengan sektor lain.
 - c. Menambah penganggaran program / kegiatan yang tidak mencapai target.

Secara ringkas hasil rekapitulasi terhadap pelaksanaan rencana kerja (Renja) dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tahun 2020 diuraikan sebagaimana pada tabel 2.1

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SKPD s/d tahun 2020
KABUPATEN MINAHASA

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2019	Realisasi Renja SKPD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Wajib									
1.02	Kesehatan									
1.02.01	Dinas Kesehatan									
1	0201	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pihak yang berkepentingan dan pegawai thd pelayanan administrasi dan tugas teknis kantor (score 1 s.d 4)	100%	100%		100%	100%	
				Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	84,69%
1	0201	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	77,78%	77,78%	
1				pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	100%	100%	4 unit	4 unit	100%
	0201	02		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%
1	0201	02		Pengadaan peralatan dan Perlengkapan gedung kantor (DAK Kesehatan Pelayanan Dasar)	Terpeliharanya secara rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%
1	0201	02		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (DAK Kesehatan Pelayanan Dasar)	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	100%	0%	1 Paket	0	0%
1	0201	02		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor (DAK Tahun Sebelumnya)	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai	100%	100%	1 Paket	1 Paket	99,35%
1	0201	02		Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor (DAK kesehatan kefarmasian)	Tersedianya peralatan gedung kantor yang diadakan	100%	100%	1 Paket		99,73%
				Kalibrasi Peralatan Kesehatan		100%		1 Paket	0	0%
				Rehabilitasi Gedung Instalasi Farmasi		100%		1 Paket	1 Paket	98%
1	0201	02		Pengadaan peralatan dan Perlengkapan gedung kantor (DAK Penugasan Kesehatan Pengendalian Penyakit)	Tersedianya peralatan perlengkapan gedung kantor	100%		1 Paket	1 Paket	94%
1	0201	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur							
1	0201	03	05	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2019	Realisasi Renja SKPD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	0201	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					0	0%
1	0201	05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1 keg	100%	1 keg	1 keg	100%
1	0201	05		Sosialisasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bagi Tenaga Kesehatan	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bagi Tenaga Kesehatan	1 keg	100%			
1	0201	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						
1	0201	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD		1keg		1 keg	1 keg	100%
1	0201	15		Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%
1	0201	15	01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan	100%	100%	1 paket	1 paket	97,42%
1	0201	15	07	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK Kesehatan Kefarmasian)	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan	100%	88.77%	1 paket	1 paket	92,96%
1	0201	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat						
1	0201	16	02	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	1 keg	100%	1 keg	1 keg	99,69%
1	0201	16	09	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya peningkatan kesehatan masyarakat	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	91.44%
1	0201	16		Sosialisasi Public Safety Centre (SPC) 119	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Public Safety Centre (SPC) 119	1 keg	100%			
1	0201	17		Program Pengawasan Obat dan Makanan						
1	0201	17	05	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan, Obat dan Bahan Berbahaya	Terlaksananya kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan dan bahan berbahaya	1 keg			1 Keg	1 keg
1	0201	17	06	Pengawasan Keamanan Pangan dan bahan berbahaya	Terlaksananya kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan dan bahan berbahaya	1 keg		1 keg	0	0%
1	0201	19		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kabupaten Sehat					
1	0201	19	01	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Terlaksananya kegiatan pengembangan media promosi	1 keg	100%	1 keg	1 keg	24%
1	0201	19	02	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	Terlaksananya kegiatan penyuluhan	1 keg	100%	1 keg	1 keg	100%

1	0201	19	07	Pemberdayaan masyarakat : diskusi terarah untuk pengembangan wilayah sehat dalam rangka Kabupaten Sehat	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan masyarakat : diskusi terarah untuk pengembangan wilayah sehat dalam rangka Kabupaten Sehat	1 keg			1 keg	1 keg	94%			
1	0201	20		Program Perbaikan Gizi										
1	0201	20		Pemetaan Deteksi Dini Stunting dan Gizi Kurang	Terlaksananya kegiatan Pemetaan Deteksi Dini Stunting dan Gizi Kurang	1 keg	100%					1 keg	1 keg	99,19%
1	0201	20		Pemantauan Status Gizi	Terlaksananya kegiatan Pemantauan Status Gizi	1 keg			1 keg	0	0%			
1	0201	20		Pertemuan Pendampingan Anak Stunting dan Gizi Kurang	Terlaksananya kegiatan Pertemuan Pendampingan Anak Stunting dan Gizi Kurang	1 keg			1 keg	0	0%			
1	0201	20		Pengendalian Stunting	Terlaksananya kegiatan Pengendalian Stunting	1 keg			1 keg	1 keg	99,97%			
1	0201	21		Program Pengembangan Lingkungan Sehat										
1	0201	21		Deklarasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Terlaksananya kegiatan STBM	25 desa						25 desa	25 desa	100%
1	0201	21	07	Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Terlaksananya kegiatan Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	1 keg	100%							
1	0201	22		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Terlaksananya program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	100%								
1	0201	22	01	Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	Terlaksananya fogging	1 paket	100%		1 paket	1 paket	100%			
1	0201	22	05	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Terlaksananya pelayanan penyakit menular	1 paket	100%					1 keg	1 keg	58,93%
1	0201	22	16	Pembinaan Puskesmas Dalam Pengendalian TB dan Kusta	Terlaksananya kegiatan Pembinaan Puskesmas Dalam Pengendalian TB dan Kusta	1 keg			1 keg	0	0%			
1	0201	22	08	Peningkatan Imunisasi	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Imunisasi	1 keg	100		1 keg	1 keg	100%			
1	0201	22	09	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (DID Tambahan)	Terlaksananya kegiatan Workshop Layanan Komprehensif HIV Berkesinmbungan							1 keg	1 keg	36,55%
1	0201	22		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program One Health Dalam Pengendalian Penyakit Rabies	Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program One Health Dalam Pengendalian Penyakit Rabies	1 keg			1 keg	1 keg	100%			
1	0201	23		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan										
1	0201	23	03	Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	1 keg	100%		1 keg	1 keg	96,50%	1 keg	1 keg	100%
1	0201	23	07	Bimbingan Teknis Tentang Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis tentang standarisasi pelayanan kesehatan	1 keg	100%		1 keg	1 keg	96,91%			
1	0201	23	09	Pemutakhiran Data Aplikasi Sarana dan Prasarana Kesehatan	Terlaksananya kegiatan Pemutakhiran Data Aplikasi Sarana dan Prasarana Kesehatan	1 keg	100%		1 keg	1 keg	100%			
1	0201	23	10	Pemutakhiran Data Profil Kesehatan	Terlaksananya kegiatan Pemutakhiran Data Profil Kesehatan	1 keg			1 keg	1 keg	100%			
1	0201	25		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Jumlah sarana/prasarana puskesmas yang diadakan dan diperbaiki									
1	0201	25		Pembangunan Puskesmas Walantakan	Terbangunnya puskesmas Walantakan	1 paket	100%							
1	0201	25		Pembangunan Puskesmas Tompaso Barat	Terbangunnya puskesmas Tompaso Barat	1 paket			1 paket	1 paket	99,92%			

1	0201	25	Rehabilitasi Puskesmas Tonsea Lama	Terlaksananya rehabilitasi Puskesmas Tonsea Lama	1 paket	100%							
1	0201	25	Rehabilitasi Puskesmas Tombulu	Terlaksananya rehabilitasi Puskesmas Tombulu	1 paket	100%							
1	0201	25	Rehabilitasi Puskesmas Lolah	Terlaksananya rehabilitasi Puskesmas Lolah	1 paket	100%							
1	0201	25	Rehabilitasi Puskesmas Sonder	Terlaksananya rehabilitasi Puskesmas Sonder	1 paket	100%							
1	0201	25	Rehabilitasi Puskesmas Tompaso	Terlaksananya rehabilitasi Puskesmas Tompaso	1 paket	100%							
1	0201	25	Rehabilitasi Puskesmas Kawangkoan	Terlaksananya rehabilitasi Puskesmas Kawangkoan	1 paket	100%							
1	0201	25	Pembangunan Puskesmas Pembantu Tikela	Terlaksananya pembangunan Puskesmas Pembantu Tikela	1 paket	100%							
1	0201	25	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Leilem	Terlaksananya rehabilitasi Puskesmas Pembantu Leilem	1 paket	100%							
1	0201	25	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Kiawa II Barat	Terlaksananya rehabilitasi Puskesmas Pembantu Kiawa II Barat	1 paket	100%							
1	0201	25	Rehabilitasi Poskesdes Kiawa II	Terlaksananya rehabilitasi Poskesdes Kiawa II	1 paket	100%							
1	0201	25	Rehabilitasi Poskesdes Kembes	Terlaksananya rehabilitasi Poskesdes Kembes	1 paket	100%							
1	0201	25	Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas Kakas	Terlaksananya rehabilitasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas Kakas	1 paket	100%							
1	0201	25	Pembangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Pineleng	Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas dokter Puskesmas Pineleng	1 paket	100%							
1	0201	25	Pembangunan Rumah Dinas Perawat Puskesmas Pineleng	Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas perawat Puskesmas Pineleng	1 paket	100%							
1	0201	25	Pembangunan Pagar Puskesmas Kakas Barat	Terlaksananya Pembangunan Pagar Puskesmas Kakas Barat	1 paket	100%							
1	0201	25	Pembangunan Pagar Puskesmas Kakas	Terlaksananya Pembangunan Pagar Puskesmas Kakas	1 paket	100%							
1	0201	25	Pembangunan Instalasi Air Bersih Puskesmas Tateli	Terlaksananya pembangunan Instalasi Air Bersih Puskesmas Tateli	1 paket	100%							
1	0201	25	Pembangunan Puskesmas Tompaso Barat	Terlaksananya Pembangunan Puskesmas Tompaso Barat	1 pkm			1 pkm	1 pkm	100%			
1	0201	25	Rehabilitasi Puskesmas Tateli	Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas Tateli	1 pkm			1 pkm	1 pkm	100%			
1	0201	25	Rehabilitasi Puskesmas Manembo	Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas Manembo	1 pkm			1 pkm	1 pkm	100%			
1	0201	25	Pembangunan Rumah Jabatan Dokter Puskesmas Kombi	Terlaksananya Pembangunan Rumah Jabatan Dokter Puskesmas Kombi	1 paket			1 paket	1 paket	100%			
1	0201	25	Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah (IPL) Puskesmas Tateli	Terlaksananya Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah (IPL) Puskesmas Tateli	1 paket			1 paket	1 paket	100%			
1	0201	25	Penambahan gedung/ruang baru Puskesmas Koya	Terlaksananya Penambahan gedung/ruang baru Puskesmas Koya	1 paket						1 paket	1 paket	100%
1	0201	25	Rehabilitasi Puskesmas Tandengan	Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas Tandengan	1 pkm						1 pkm	1 pkm	100%
1	0201	25	Rehabilitasi Puskesmas Papakelan	Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas Papakelan	1 pkm						1 pkm	1 pkm	100%

1	0201	25		Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Kawangkoan Barat	Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Kawangkoan Barat	1 paket					1 paket	1 paket	100%
1	0201	25		Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Tanawangko	Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Tanawangko	1 paket					1 paket	1 paket	100%
1	0201	25		Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Kombi	Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Kombi	1 paket					1 paket	1 paket	100%
1	0201	25		Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Puskesmas Kawangkoan Barat	Terlaksananya Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Puskesmas Kawangkoan Barat	1 paket					1 paket	1 paket	100%
1	0201	25		Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Puskesmas Lolah	Terlaksananya Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Puskesmas Lolah	1 paket					1 paket	1 paket	100%
1	0201	25		Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Puskesmas Pineleng	Terlaksananya Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Puskesmas Pineleng	1 paket					1 paket	1 paket	100%
1	0201	25		Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Puskesmas Kakas	Terlaksananya Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Puskesmas Kakas	1 paket					1 paket	1 paket	100%
1	0201	25		Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Puskesmas Kombi	Terlaksananya Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Puskesmas Kombi	1 paket					1 paket	1 paket	100%
1	0201	25		Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Mokupa	Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Mokupa	1 paket					1 paket	1 paket	14,87%
1	0201	25		Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Suluan	Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Suluan	1 paket					1 paket	1 paket	100%
1	0201	28		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan									
1	0201	28	01	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya kemitraan asuransi kesehatan	100%	100%						
1	0201	28	11	Jaminan Kesehatan Daerah	Tersedianya Jaminan Kesehatan Daerah	100%	100%	1 paket	1 paket	89,90%	1 paket	1 paket	87,86%
1	0201	28	12	Workshop Pengelolaan JKN	Terlaksananya kegiatan Workshop Pengelolaan JKN	1 keg		1 keg	1 keg	0%			
1	0201	29		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita									
1	0201	29		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	1 keg	100%						
1	0201	30		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia									
1	0201	30	01	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan	Terlaksananya kegiatan pelayanan pemeliharaan kesehatan	1 keg	100%	1 keg	1 keg	47%	1 keg	1 keg	100%
1	0201	32		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak									
1	0201	32	06	Peningkatan Kewaspadaan Ibu Hamil Terhadap Resiko Kehamilan, Persalinan dan Nifas AMP	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kewaspadaan Ibu Hamil Terhadap Resiko Kehamilan, Persalinan dan Nifas AMP	1 keg		1 keg	1 keg	100%			
1	0201	32	07	Penanganan Kasus Ibu Hamil dan Anak Dengan Rujukan Gawat Darurat di Puskesmas	Terlaksananya kegiatan Penanganan Kasus Ibu Hamil dan Anak Dengan Rujukan Gawat Darurat di Puskesmas	1 keg		1 keg	0	0%			
1	0201	18		Program Jaminan Kesehatan Nasional									
1	0201	18	01	Kapitasi JKN Puskesmas Koya	Jumlah dana kapitasi yang diterima pkm Koya	100%	96,84%	1.809.795.472	1.415.850.294	78,23%	1.921.789.623	1.206.761.075	62,79%
1	0201	18	02	Kapitasi JKN Puskesmas Tonsea Lama	Jumlah dana kapitasi yang diterima pkm Tonsea Lama	100%	54,67%	863.762.838	489.761.151	56,70%	861.979.700	385.272.888	44,70%
1	0201	18	03	Kapitasi JKN Puskesmas Papakelan	Jumlah dana kapitasi yang diterima pkm Papakelan	100%	97,96%	890.757.763	687.537.164	77,19%	892.642.630	594.897.281	66,64%
1	0201	18	04	Kapitasi JKN Puskesmas Tandengan	Jumlah dana kapitasi yang diterima pkm Tandengan	100%	85,24%	874.902.675	669.084.267	76,48%	818.382.321	542.599.480	66,30%

1	0201	18	05	Kapitasi JKN Puskesmas Kombi	Jumlah dana kapitasi yang diterima Pkm Kombi	100%	87.45%	785.275.656	526.130.663	67%	827.327.530	547.083.805	66,13%
1	0201	18	06	Kapitasi JKN Puskesmas Seretan	Jumlah dana kapitasi yang diterima Pkm Seretan	100%	90.72%	522.166.380	377.588.951	72,31%	516.728.330	341.333.099	66,06%
1	0201	18	07	Kapitasi JKN Puskesmas Kakas	Jumlah dana kapitasi yang diterima Pkm Kakas	100%	82.22%	894.182.308	610.909.124	68,32%	882.130.947	518.529.150	58,78%
1	0201	18	07	Kapitasi JKN Puskesmas Kakas Barat	Jumlah dana kapitasi yang diterima Pkm Kakas Barat	100%					791.755.700	431.336.798	54,45%
1	0201	18		Kapitasi JKN Puskesmas Remboken	Jumlah dana kapitasi yang diterima Pkm Remboken	100%	89.60%	961.910.300	536.509.075	55,78%	900.000.000	607.815.525	67,54%
1	0201	18		Kapitasi JKN Puskesmas Wolaang	Jumlah dana kapitasi yang diterima Pkm Wolaang	100%	79.62%	989.006.557	814.996.413	82,41%	36.000.000	712.622.300	72,35%
1	0201	18		Kapitasi JKN Puskesmas Manembo	Jumlah dana kapitasi yang diterima Pkm Manembo	100%	78.25%	506.716.857	362.001.656	71,44%	531.371.020	365.823.404	68,85%
1	0201	18		Kapitasi JKN Puskesmas Walantakan	Jumlah dana kapitasi yang diterima Pkm Walantakan	100%	67.59%	645.289.725	429.062.299	66,49%	643.904.674	375.554.950	58,32%
1	0201	18		Kapitasi JKN Puskesmas Tumaratas	Jumlah dana kapitasi yang diterima Pkm Tumaratas	100%	93.20%	992.882.232	902.119.925	90,86%	992.735.887	703.461.025	70,86%
1	0201	18		Kapitasi JKN Puskesmas Tompaso	Jumlah dana kapitasi yang diterima Pkm Tompaso	100%	104.36%	1.089.585.877	797.218.478	73,17%	1.083.593.316	779.847.675	71,97%
1	0201	18		Kapitasi JKN Puskesmas Kawangkoan	Jumlah dana kapitasi yang diterima Pkm Kawangkoan	100%	72.39%	1.002.248.351	1.091.957.422	108,95%	1.000.000.000	971.409.180	97,14%
1	0201	18		Kapitasi JKN Puskesmas Sonder	Jumlah dana kapitasi yang diterima Pkm Sonder	100%	86.76%	1.141.511.822	813.258.967	71,24%	1.264.369.000	1.024.856.781	81,06%
1	0201	18		Kapitasi JKN Puskesmas Loloh	Jumlah dana kapitasi yang diterima Pkm Loloh	100%	89.39%	791.979.528	723.486.656	91,35%	780.000.000	491.144.420	62,97%
1	0201	18		Kapitasi JKN Puskesmas Tanawangko	Jumlah dana kapitasi yang diterima Pkm Tanawangko	100%	93.76%	1.200.419.057	985.035.455	82,06%	1.204.192.142	736.235.895	61,14%
1	0201	18		Kapitasi JKN Puskesmas Tateli	Jumlah dana kapitasi yang diterima Pkm Tateli	100%	84.32%	1.076.015.897	759.552.414	70,59%	1.168.722.101	590.595.938	50,53%
				Kapitasi JKN Puskesmas Pineleng	Jumlah dana kapitasi yang diterima Pkm Pineleng	100%	88.51%	1.138.096.288	1.165.733.753	102,43%	1.191.976.279	986.243.381	82,74%
				Kapitasi JKN Puskesmas Tombulu	Jumlah dana kapitasi yang diterima Pkm Tombulu	100%	76.32%	1.088.739.665	864.643.625	79,42%	1.093.036.681	512.233.906	48,86%
				Kapitasi JKN Puskesmas Kawangkoan Barat	Jumlah dana kapitasi yang diterima Pkm Kawangkoan Barat	100%	-	562.716.000	193.733.230	34,43%	562.716.000	336.305.000	59,76%
				Non Kapitasi JKN Puskesmas Wolaang	Jumlah dana non kapitasi yang diterima Pkm Wolaang	100%	2.76%	60.000.000	35.900.000	59,83%	36.000.000	0	0%
				Non Kapitasi JKN Puskesmas Tompaso	Jumlah dana non kapitasi yang diterima Pkm Tompaso	100%	6.42%	140.000.000	42.920.000	30,66%	97.320.000	0	0%
				Non Kapitasi JKN Puskesmas Kawangkoan	Jumlah dana non kapitasi yang diterima Pkm Kawangkoan	100%	10.04%	150.000.000	37.740.000	25,16%	90.000.000	0	0%
				Non Kapitasi JKN Puskesmas Sonder	Jumlah dana non kapitasi yang diterima Pkm Sonder	100%		10.000.000	0	0	6.000.000	0	0%
				Non Kapitasi JKN Puskesmas Tanawangko	Jumlah dana non kapitasi yang diterima Pkm Tanawangko	100%	2.77%	50.000.000	10.340.000	20,68%	30.000.000	0	0%
				Non Kapitasi JKN Puskesmas Pineleng	Jumlah dana non kapitasi yang diterima Pkm Pineleng	100%	1.33%	30.000.000	21.000.000	70%	18.000.000	0	0%
				Non Kapitasi JKN Puskesmas Remboken	Jumlah dana non kapitasi yang diterima Pkm Remboken	100%							
				Non Kapitasi JKN Puskesmas Kakas	Jumlah dana non kapitasi yang diterima Pkm Kakas	100%	4.67%	60.000.000	9.360.000	15,60%	51.360.000	0	0%
1	0201	19		Program Akreditasi Puskesmas									
				Akreditasi Puskesmas	Terlaksananya Akreditasi Puskesmas	1 keg	100%	2.682.232.000	2.319.159.502	86,46%	2.896.143.565	1.482.653.500	51,19%
				Sosialisasi Akreditasi Puskesmas	Terlaksananya sosialisasi akreditasi puskesmas	1 keg	100%	30.000.000	30.000.000	100%			
1	0201	20		Program Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)									
				Jaminan Persalinan	Tersedianya jaminan persalinan	1 keg	100%	1 Paket	1 Paket	96,29%	1 Paket	1 Paket	67,74%
1	0201	36	03	Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)									
1	0201	36	01	BOK Puskesmas Kakas	Jumlah dana BOK Puskesmas Kakas	100%	79.29%	990.000.000	857.731.300	86,64%	915.316.250	806.776.750	88,14%
1	0201	36	02	BOK Puskesmas Loloh	Jumlah dana BOK Puskesmas Loloh	100%	71.76%	990.000.000	577.550.071	86,20%	616.400.000	495.651.050	80,41%
1	0201	36	03	BOK Puskesmas Sonder	Jumlah dana BOK Puskesmas Sonder	100%	78.14%	670.000.000	746.931.000	83,92%	818.800.000	729.295.000	89,07%
1	0201	36	04	BOK Puskesmas Tandengan	Jumlah dana BOK Puskesmas Tandengan	100%	79.18%	890.000.000	412.711.500	57,72%	657.800.000	373.672.400	56,81%

1	0201	36	05	BOK Puskesmas Tompaso	Jumlah dana BOK Puskesmas Tompaso	100%	82.82%	715.000.000	1.034.951.000	98,25%	969.151.000	953.426.100	98,38%
1	0201	36	06	BOK Puskesmas Papakelan	Jumlah dana BOK Puskesmas Papakelan	100%	78.38%	1.053.425.000	638.545.000	78,83%	745.200.000	550.723.000	73,90%
1	0201	36	07	BOK Puskesmas Kakas Barat	Jumlah dana BOK Puskesmas Kakas Barat	100%	82.41%	810.000.000	538.406.000	75,83%	653.936.000	516.506.000	78,98%
1	0201	36	08	BOK Puskesmas Seretan	Jumlah dana BOK Puskesmas Seretan	100%	76%	710.000.000	404.616.200	68,58%	542.800.000	350.345.000	64,54%
1	0201	36	09	BOK Puskesmas Kombi	Jumlah dana BOK Puskesmas Kombi	100%	83.68%	590.000.000	526.419.900	63,42%	763.600.000	579.909.500	75,94%
1	0201	36	10	BOK Puskesmas Koya	Jumlah dana BOK Puskesmas Koya	100%	77.90%	830.000.000	885.099.800	91,06%	903.960.000	869.650.000	96,20%
1	0201	36	11	BOK Puskesmas Tumaratas	Jumlah dana BOK Puskesmas Tumaratas	100%	69.48%	972.000.000	572.003.400	78,14%	680.760.000	481.562.100	70,74%
1	0201	36	12	BOK Puskesmas Kawangkoan Barat	Jumlah dana BOK Puskesmas Kawangkoan Barat	100%	82.99%	732.000.000	473.739.000	66,96%	657.975.000	596.018.451	90,58%
1	0201	36	13	BOK Puskesmas Kawangkoan	Jumlah dana BOK Puskesmas Kawangkoan	100%	77.22%	707.500.000	918.950.000	92,64%	922.560.000	879.206.500	95,30%
1	0201	36	14	BOK Puskesmas Manembo	Jumlah dana BOK Puskesmas Manembo	100%	63.44%	992.000.000	352.438.400	50,33%	651.255.750	413.604.000	63,51%
1	0201	36	15	BOK Puskesmas Tateli	Jumlah dana BOK Puskesmas Tateli	100%	77.88%	700.275.000	417.412.250	55,65%	697.500.000	440.219.500	63,11%
1	0201	36	16	BOK Puskesmas Tonsea Lama	Jumlah dana BOK Puskesmas Tonsea Lama	100%	67.93%	750.000.000	442.018.346	63,07%	651.000.000	461.335.000	70,87%
1	0201	36	17	BOK Puskesmas Remboken	Jumlah dana BOK Puskesmas Remboken	100%	59.49%	700.800.000	343.854.600	58,78%	544.050.000	485.320.102	89,21%
1	0201	36	18	BOK Puskesmas Pineleng	Jumlah dana BOK Puskesmas Pineleng	100%	70.24%	585.000.000	708.155.075	69,63%	945.810.000	713.227.900	75,41%
1	0201	36	19	BOK Puskesmas Tanawangko	Jumlah dana BOK Puskesmas Tanawangko	100%	59.16%	770.000.000	510.466.000	66,29%	716.100.000	459.142.700	64,12%
1	0201	36	20	BOK Puskesmas Walantakan	Jumlah dana BOK Puskesmas Walantakan	100%	77.50%	700.000.000	439.748.125	62,82%	651.000.000	421.425.000	64,74%
1	0201	36	21	BOK Puskesmas Wolaang	Jumlah dana BOK Puskesmas Wolaang	100%	75.03%	852.000.000	546.007.000	64,09%	792.360.000	584.638.500	73,78%
1	0201	36	22	BOK Puskesmas Tombulu	Jumlah dana BOK Puskesmas Tombulu	100%	70.99%	802.000.000	525.783.968	65,56%	745.860.000	499.878.280	67,02%
1	0201	36	23	BOK Dukungan Manajemen Dinas Kesehatan	Jumlah dana Dukungan Manajemen yang diterima	100%	92.94%				94.461.707	50.496.900	53,46%
				BOK UKM Sekunder Dinas Kesehatan	BOK UKM Sekunder Dinas Kesehatan	100%		1.206.000.000	1.056.814.900	87,63%	1.609.164.296	1.410.513.601	87,66%
				BOK Distribusi Obat dan E-Logistik	BOK Distribusi Obat dan E-Logistik	100%		276.733.000	136.915.000	49,48%	110.767.000	95.040.000	85,80%
				BOK Dukungan Manajemen BOK dan Jampersal Dinas Kesehatan	BOK Dukungan Manajemen BOK dan Jampersal Dinas Kesehatan	100%		1.039.000.000	755.414.360	72,71%			
				Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid - 19	Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid - 19	100%					8.918.287.172	8.918.287.172	100%
1	0201	37		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular									
1	0201	37	01	Gerakan Masyarakat Sehat Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM)	Terlaksananya kegiatan Gerakan Masyarakat Sehat Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM)	1 keg	100%						
1	0201	37	02	Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Bagi Wanita Usia Subur	Terlaksananya kegiatan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Bagi Wanita Usia Subur	1 keg	100%						
1	0201	37	03	Workshop penggerakan masyarakat dalam pengendalian penyakit tidak menular	Terlaksananya kegiatan Workshop penggerakan masyarakat dalam pengendalian penyakit tidak menular	1 keg		1 keg	1 keg	100%			
1	0201	37	04	Screening Pencegahan kanker leher rahim	Terlaksananya kegiatan Screening Pencegahan kanker leher rahim	1 keg		1 keg	1 keg	100%			
1	0201	38		Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat									
1	0201	38	01	Peningkatan Penyelenggaraan Registrasi, Akreditasi, Sertifikasi Tenaga Kesehatan	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Registrasi, Akreditasi, Sertifikasi Tenaga Kesehatan			1 keg	1 keg	100%			

1	0201	38	02	Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Bidang Kesehatan	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Bidang Kesehatan			1 keg	0	0%			
1	0201	38	03	Workshop Pembinaan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan	Terlaksananya kegiatan Workshop Pembinaan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan			1 keg	0	0%			
1	0201	38	04	Monitoring dan Evaluasi Pembinaan, Pengawasan, Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan, Pengawasan, Pelaksanaan Pembangunan			1 keg	0	0%			

1

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Penetapan indikator pelayanan kesehatan di Kabupaten Minahasa, disusun dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun tingkat Kabupaten. Dalam menilai tingkat kinerja pelayanan ini, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa diwajibkan memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU), dimana dalam pasal 2 point a dan b, IKU bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Selain itu, kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa, juga diukur dengan mempergunakan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019, serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008.

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD DINAS KESEHATAN

No	Indikator	SPM/ Standard Nas. (%)	IKK (%)	Target (%)				Realisasi Capaian (%)		Proyeksi (%)		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup		16/1.000 KH	5.35/1.000 KH	4.9/1.000 KH	4.7/1.000 KH	4.5/1.000 KH	5.35/1.000 KH	4.9/1.000 KH	4.7/1.000 KH	4.5/1.000 KH	
2	Angka kelangsungan hidup bayi		984	994.65	995.1	995.3	995.5	994.65	995.1	995.3	995.5	
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup		6.58	6.58	6	5	5	6.58	6	5	5	
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup		9/1.000 KH	9/1.000 KH	8/1.000 KH	7/1.000 KH	6/1.000 KH	9	8/1.000 KH	7/1.000 KH	6/1.000 KH	
5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup		232	61.7/100.000 KH	41/100.000 KH	20.56/100.000 KH	17/100.000 KH	61.7/100.000 KH	41/100.000 KH	20.56/100.000 KH	17/100.000 KH	
6	Prevalensi Stunting Balita		22	15%	14.5%	14%	13.5%	15%	14.5%	14%	13.5%	
7	Prevalensi wasting balita		7	10%	9.5%	9%	8%	10%	9.5%	9%	8%	
8.	Rasio posyandu per satuan balita		12.7	12.7	13.3	14.1	14.6	12.7	13.3	14.1	14.6	
9.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk		12.41	12.41	12.45	12.47	12.5	12.41	12.45	12.47	12.5	
10.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk		1.18	1.18	1.22	1.23	1.24	1.18	1.22	1.23	1.24	
11.	Rasio dokter per satuan penduduk											
12.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk											

13.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani		87%	87%	90%	92%	94%	87%	90%	92%	94%	
14.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan		94.79%	94.79%	95%	96%	97%	94.79%	95%	96%	97%	
15.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		91.10%	91.10%	92%	93%	94%	91.10%	92%	93%	94%	
16.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
17.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak		92%	92%	93%	94%	95%	92%	93%	94%	95%	
18.	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk		≥2	2	≥2	≥2	≥2	≥2	≥2	≥2	≥2	
19.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
20.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA		40.33%	40.33%	41%	42%	43%	40.33%	41%	42%	43%	
21.	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		190	144	143	142	141	144	143	142	141	
22.	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS		43	43	44	45	46	43	44	45	46	
23.	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS		87	87	90	91	92	87	90	91	92	
24.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
26.	Penderita diare yang ditangani		91.08%	91.08%	92%	93%	94%	91.08%	92%	93%	94%	
27.	Angka kejadian Malaria		<1‰	<1‰	<1‰	<1‰	<1‰	<1‰	<1‰	<1‰	<1‰	
28.	Tingkat kematian akibat malaria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

29.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi		0.37%	0.37%	0.30%	0.29%	0.28%	0.37%	0.30%	0.29%	0.28%	
30.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
31.	Cakupan kunjungan bayi		83%	83%	85%	90%	90%	83%	85%	90%	90%	
32.	Cakupan puskesmas		88%	88%	92%	96%	100%	88%	92%	96%	100%	
33.	Cakupan pembantu puskesmas		15.56%	15.56%	22.96%	26.67%	33.33%	15.56%	22.96%	26.67%	33.33%	
34.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4		85%	85%	87%	90%	93%	85%	87%	90%	93%	
35.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%		83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
36.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani		80%	80%	85%	95%	95%	80%	85%	95%	95%	
37.	Persentase Anak usia 0-59 bulan yg mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	65.80%	65.80%	100%	100%	100%	65.80%	100%	100%	100%	
38.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin		100%	20%	25%	30%	35%	20%	25%	30%	35%	
39.	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100%		n/a	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	100%	
40.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
41.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
42.	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

43.	Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif		71.11%	71.11%	60%	70%	80%	71.11%	60%	70%	80%	
44.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100%		n/a	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	100%	
45.	Persentase Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%		n/a	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	100%	
46.	Persentase penduduk usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%		n/a	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	100%	
47.	Persentase penduduk usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%		94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
48.	Persentase penderita Hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
49.	Persentase penderita DM yg mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
50.	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%		n/a	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	100%	
51.	Persentase Orang terduga Tuberkulosis mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%		n/a	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	100%	
52.	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%		n/a	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	100%	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

1. Tingkat Kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah;

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah Dinas Kesehatan juga memiliki permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Hasil identifikasi terhadap permasalahan secara lebih detail diuraikan pada Tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
			Internal (Kewenangan Perangkat Daerah)	Eksternal (diluar kewenangan P. Daerah)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah					
1. Pelayanan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya akses pelayanan kesehatan berkualitas dan aman	SPM Bidang Kesehatan (berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019)	Kapasitas SDM Bidang Kesehatan	Dukungan Sektor/kelembagaan terkait	Belum meratanya petugas kesehatan ke seluruh desa khususnya daerah sulit dijangkau disertai dengan peningkatan pengawasan dan pembinaannya
	Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak	SPM Bidang Kesehatan (berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019)	Kapasitas SDM Bidang Kesehatan	Dukungan Sektor/kelembagaan terkait	Kondisi ibu hamil dengan status gizi Kurang Energi Kronis (KEK) Kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil yang belum memadai terutama pada proses persalinan Faktor Determinan (Perilaku ibu hamil yang tidak melakukan ANC, masih tingginya penyakit infeksi berbasis lingkungan)

	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang gizi	SPM Bidang Kesehatan (berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019)	Kapasitas SDM Bidang Kesehatan	Dukungan Sektor/kelembagaan terkait	Status Gizi bukan hanya tergantung pada sector kesehatan saja tetapi ada peran serta sektor lain sehingga pencapaian indikator tersebut harus dikontribusikan pula dari sektor lain
2. Pelayanan Kesehatan Rujukan	Terpenuhinya jaminan pemeliharaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan kurang mampu dengan biaya negara	SPM Bidang Kesehatan (berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019)	Kapasitas SDM dan Sarana Prasarana Bidang Kesehatan	Dukungan Sektor/kelembagaan terkait	Masih terdapat keluhan-keluhan dari masyarakat terkait peningkatan pelnya khususnya dlm pelayanan kesehatan rujukan
3. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB	Menurunnya insiden penyakit menular.	SPM Bidang Kesehatan (berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019)	Kapasitas SDM Bidang Kesehatan	Dukungan Sektor/kelembagaan terkait	Adanya <i>re-emerging diseases</i> dan daerah endemis penyakit yang terus berkembang
	Terwujudnya lingkungan yang sehat	SPM Bidang Kesehatan (berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019)	Kapasitas SDM Bidang Kesehatan	Dukungan Sektor/kelembagaan terkait	Kualitas kesehatan lingkungan rendah yang berdampak kepada timbulnya penyakit-penyakit berbasis lingkungan
4. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Tumbuhnya kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan masyarakat	SPM Bidang Kesehatan (berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019)	Kapasitas SDM Bidang Kesehatan	Dukungan Sektor/kelembagaan terkait	Perilaku masyarakat yang dimungkinkan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan kondisi lingkungan menjadi faktor yang cukup besar untuk mempengaruhi status kesehatan masyarakat di suatu wilayah

2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap permasalahan pelayanan perangkat daerah berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah maka permasalahan-permasalahan yang ditemui, sebagai berikut :

a. Pelayanan Kesehatan Dasar

Belum meratanya petugas kesehatan ke seluruh desa khususnya daerah sulit dijangkau disertai dengan peningkatan pengawasan dan pembinaannya.

Kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil yang belum memadai terutama pada proses persalinan.

Faktor Determinan (Perilaku ibu hamil yang tidak melakukan ANC, masih tingginya penyakit infeksi berbasis lingkungan).

b. Status Gizi bukan hanya tergantung pada sektor kesehatan saja tetapi ada peran serta sektor lain sehingga pencapaian indikator tersebut harus dikontribusikan pula dari sektor lain.

c. Pelayanan kesehatan rujukan

Masih terdapat keluhan-keluhan dari masyarakat terkait peningkatan pelayanannya khususnya dalam pelayanan kesehatan rujukan.

d. Penyelidikan Epidemiologi dan penanggulangan KLB; Kesehatan Lingkungan

Adanya *re-emerging diseases* dan daerah endemis penyakit yang terus berkembang. Disamping itu kualitas kesehatan lingkungan rendah yang berdampak kepada timbulnya penyakit-penyakit berbasis lingkungan. Masyarakat belum banyak memahami pentingnya kesehatan lingkungan. Selain itu juga disadari bahwa proses peningkatan perubahan perilaku tidak dapat dilakukan secara cepat, cenderung membutuhkan waktu yang relatif lama dan kecukupan pendampingan petugas kepada masyarakat untuk menerapkan perilaku yang lebih sehat dalam kehidupan sehari-hari secara berkesinambungan.

e. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Perilaku masyarakat yang dimungkinkan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan kondisi lingkungan menjadi faktor yang cukup besar untuk mempengaruhi status kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Sebagian besar sumber daya tenaga promosi kesehatan

dan pemberdayaan masyarakat di Puskesmas merupakan tenaga kontrak yang mempunyai latar belakang pendidikan bukan tenaga promosi kesehatan, mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan ketrampilan dalam mengelola program PHBS dan mengembangkan UKBM. Meskipun program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dipegang oleh tenaga ASN (dari berbagai disiplin ilmu), namun mereka rangkap jabatan dengan program lain, mengakibatkan program promosi dan pemberdayaan masyarakat tidak dikelola secara maksimal.

Masih adanya pemikiran dan orientasi pelayanan di Puskesmas dari penanggungjawab Puskesmas bukan mengutamakan Promotif dan Preventif sehingga mengakibatkan sebagian besar kegiatan di Puskesmas tidak mengutamakan pelayanan di luar gedung.

3. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

a. *Peluang dan Tantangan Eksternal*

1) Peluang Eksternal

Kelembagaan : Adanya perubahan regulasi otonomi daerah memungkinkan untuk mengevaluasi kelembagaan yang ada.

Sumber Daya : Antara lain : a). kesempatan mengalokasikan dan mengajukan formasi kebutuhan tenaga kesehatan melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk bidan dan dokter; b). memfasilitasi Program Pendidikan Tenaga Medis; c). kerjasama dengan Perguruan Tinggi Pendidikan Kesehatan dalam rangka mencukupi tenaga kesehatan strategis; d). adanya organisasi profesi kesehatan; dan e). adanya kesempatan peningkatan pendidikan formal dan informal melalui BKD dan Badan Diklat.

Pembiayaan : Terdapat bantuan anggaran dari dunia usaha/masyarakat.

2) Tantangan Eksternal

Kelembagaan : Dukungan sektor lain terhadap bidang kesehatan masih belum optimal karena masih ada anggapan bahwa urusan kesehatan merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan saja. Jaringan kemitraan dengan berbagai pihak termasuk sektor pemerintah dan dunia usaha dalam penanganan masalah kesehatan sudah dilakukan namun belum optimal. Kemitraan yang telah dibangun belum menampakkan kepekaan, kepedulian dan rasa memiliki terhadap permasalahan dan upaya kesehatan. Kemitraan berbagai unsur terkait termasuk *stakeholder* belum ditata secara baik sesuai peran, fungsi dan tanggung jawab masing-masing dalam pemberdayaan di bidang kesehatan.

Sumber Daya (Manusia dan Sarana) : Antara lain yaitu : a) pemenuhan formasi masih tergantung pada kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; b). belum adanya regulasi pengangkatan pegawai terutama SDM kesehatan di tingkat pemerintah daerah.

Pembiayaan : Kesadaran masyarakat terhadap asuransi kesehatan belum **tumbuh** dengan baik, terlihat dari masih rendahnya kemandirian masyarakat untuk membiayai jaminan

pemeliharaan kesehatannya. Ketersediaan dan pengalokasian pembiayaan kesehatan baik dari pemerintah, masyarakat, swasta dan dunia usaha masih rendah, belum tertata secara terpadu dan terorganisir dan belum terlihat jelas pembagian tugasnya.

Budaya : Budaya masyarakat berhubungan dengan gaya hidup masyarakat setempat termasuk gaya hidup kesehatan setiap orang. Gaya Hidup yang tidak sehat dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit, antara lain : sakit jantung, tekanan darah tinggi, kanker, stroke, diabetes, dan lainnya yang kesemuanya disebabkan oleh 3 faktor resiko utama, yaitu : merokok, kurang aktifitas fisik dan kurangnya makan makanan berserat. Untuk mencegah hal tersebut perlu diterapkan gaya hidup sehat setiap hari.

b. Kelemahan dan Kekuatan Internal

1) Kelemahan Internal

Kelembagaan : Struktur organisasi Dinas kesehatan yang ada saat ini mengakibatkan beban kerja di masing-masing seksi belum seimbang. Hal ini berakibat pada koordinasi yang dilakukan belum optimal.

Sumber Daya (Manusia dan Sarana) : Tenaga kesehatan profesi (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, nutrisisionis, sanitarian) masih kurang kuantitas termasuk distribusi penempatan. Hal ini dapat menyebabkan penempatan tenaga kesehatan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan. Pengadaan alat kesehatan di beberapa sarana pelayanan kesehatan sudah mengikuti kemajuan teknologi, namun belum diikuti dengan alokasi anggaran untuk pemeliharaan yang memadai, sehingga usia pakai alat kesehatan tidak berumur panjang. Sebagian besar Puskesmas PONEB belum berfungsi secara optimal karena keterbatasan sarana prasarana, dan belum didukung kesiapan serta ketersediaan tenaga terlatih (tenaga yang sudah pernah dilatih, mengalami mutasi).

Pembiayaan : Pembiayaan kesehatan lebih mengutamakan kepada penyediaan anggaran kesehatan oleh pemerintah sendiri, selain belum efektif dan efisiensi, penggunaannya belum optimal karena alokasi yang belum sesuai dengan

prioritas kesehatan. Proporsi anggaran masih lebih besar untuk kegiatan kuratif daripada promotif dan preventif.

2) Kekuatan Internal

Kelembagaan : Keberadaan UPT Dinas Kesehatan memberi kontribusi dalam pelayanan kepada masyarakat melalui program-program kesehatan yang ada di masyarakat.

Sumber Daya (Manusia dan Sarana prasarana) : Kesempatan mengalokasikan formasi kebutuhan tenaga melalui jasa pihak ketiga seperti tenaga promkes, tenaga honor lepas . Adanya kesempatan peningkatan pendidikan secara formal dan informal tenaga kesehatan melalui dana APBD maupun APBN. Pengusulan ketersediaan/ pemenuhan sarana dan prasarana melalui anggaran bantuan pemerintah provinsi dan Dana Alokasi Khusus.

Pembiayaan : terdapat berbagai sumber alokasi anggaran dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan baik dari Pemerintah Provinsi/ APBD (hibah, bantuan keuangan desa, bantuan sosial, bantuan gubernur, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau / DBHCHT), Pemerintah pusat (Dekonsentrasi).

4. Formulasi isu-isu penting dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra.

Isu-isu penting yang dirumuskan berkaitan dengan sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Kesehatan.

Berikut diuraikan isu-isu dalam penyelenggaraan kesehatan, yaitu:

a. Akses dan kualitas pelayanan kesehatan

Pada era reformasi dan desentralisasi ini, keterbukaan publik terhadap pelayanan kesehatan sudah menjadi suatu tuntutan yang harus dipenuhi oleh perangkat daerah penyelenggara pelayanan kesehatan. Beberapa hal yang muncul terkait dengan isu pemenuhan akses dan kualitas pelayanan kesehatan muncul

dalam pelaksanaan penjangkauan aspirasi masyarakat yang telah dilaksanakan, diantaranya yaitu :

- Peningkatan akses pelayanan kesehatan melalui pembangunan sarana kesehatan di tingkat desa, pemenuhan ambulance dan puskesmas keliling juga pemenuhan sarana kesehatan rujukan.
- Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan *performance*, ketrampilan petugas pelayanan dan melalui penilaian kualitas pelayanan dengan akreditasi puskesmas.
- Peningkatan pemerataan petugas kesehatan ke seluruh desa khususnya daerah sulit dijangkau disertai dengan peningkatan pengawasan dan pembinaannya.

b. Pelayanan kesehatan masyarakat miskin

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin terus ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa baik dari sisi pembiayaannya maupun kemudahan dalam pemberian pelayanan melalui program Jamkesda sebagai pendamping dari program Jamkesmas. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat keluhan-keluhan dari masyarakat terkait peningkatan pelayanannya khususnya dalam pelayanan kesehatan rujukan.

c. **Pemberdayaan Masyarakat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat**

Komponen perilaku dan lingkungan sehat merupakan garapan utama promosi kesehatan. Promosi kesehatan adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat agar dapat memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya (WHO). Pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan bukanlah pekerjaan yang mudah, karena menyangkut aspek, perilaku yang erat kaitannya dengan sikap, kebiasaan, pengetahuan, pendidikan, kemampuan, potensi dan faktor-faktor budaya pada umumnya yang dapat berdampak positif atau negatif terhadap kesehatan.

Perilaku masyarakat yang dimungkinkan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan kondisi lingkungan menjadi faktor yang cukup besar untuk mempengaruhi status kesehatan masyarakat di suatu wilayah.

d. **Pengendalian penyakit berbasis lingkungan**

Peningkatan lingkungan sehat merupakan hal yang sangat penting dalam peningkatan derajat kesehatan dimana menurut teori HL. Bloom, lingkungan merupakan 40% penyebab dari masalah-masalah kesehatan. Hal ini didukung dengan adanya keinginan masyarakat agar ada upaya-upaya yang prioritas dilakukan untuk peningkatan pemenuhan sarana sanitasi dasar dan kualitas lingkungan ini, sehingga penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan dapat dieliminir.

Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap masalah kesehatan diantaranya yaitu ketersediaan air bersih bagi masyarakat baik dari segi kuantitas maupun kualitas, penyediaan jamban keluarga dan juga rumah sehat.

Kondisi perumahan yang layak dan sehat akan memberikan dampak yang positif terhadap status kesehatan, karena faktor pencahayaan, kelembaban maupun kepadatan hunian memiliki hubungan terhadap potensi penularan beberapa penyakit. Intervensi dalam penyehatan perumahan dan lingkungan pemukiman bukan menjadi tugas dari Dinas Kesehatan saja tetapi merupakan tugas bersama lintas sektoral secara terintegrasi.

e. Gizi buruk dan revitalisasi posyandu

Dalam upaya penanganan masalah gizi buruk, diperlukan adanya keterkaitan dengan sektor/bidang lain khususnya dalam pencegahan sebelum kasus gizi buruk terjadi. Kasus gizi buruk dapat teridentifikasi lebih dini melalui kegiatan penimbangan balita yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan, namun kendala yang ditemui belum semua ibu yang mempunyai balita datang secara rutin setiap bulan hal ini bisa dilihat dari capaian penimbangan balita yang belum mencapai 100%. Berkaitan dengan itu maka revitalisasi posyandu menjadi penting untuk dilaksanakan sehingga fungsinya akan semakin meningkat. Selain itu pemenuhan dan peningkatan kemampuan kader juga perlu terus dilakukan sebagai pelaksana posyandu.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2018 yang dilakukan melalui proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting

terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, diuraikan sebagaimana tabel 2.4.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020
Kabupaten Minahasa

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Minahasa	Tingkat kepuasan pihak yang berkepentingan dan pegawai thd pelayanan administrasi dan tugas teknis kantor (Skore 1 s.d 4)	3	710.003.500	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Minahasa	Tingkat kepuasan pihak yang berkepentingan dan pegawai thd pelayanan administrasi dan tugas teknis kantor (Skore 1 s.d 4)	3	710.003.500	
	Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran		Terpenuhinyakebutuhanpelayananadmi nistrasiperkantoran	1 paket		Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran		Terpenuhinyakebutuhanpelayananadmi nistrasiperkantoran			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tingkat pematuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	80.00%	3.400.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tingkat pematuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	80.00%		
	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kab. Min	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	2 paket	837.121.600	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kab. Min	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	2 paket	837.121.600	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. Min	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		53.350.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. Min	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		53.350.000	
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor (DAK Kesehatan Pelayanan Dasar)	Kab. Min	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor (DAK Kesehatan Pelayanan Dasar)	1 Paket	2.470.000.000	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor (DAK Kesehatan Pelayanan Dasar)	Kab. Min	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor (DAK Kesehatan Pelayanan Dasar)	1 Paket	2.470.000.000	
	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional (DAK Kesehatan Pelayanan Dasar)	Kab. Min	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional (DAK Kesehatan Pelayanan Dasar)		682.000.000	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional (DAK Kesehatan Pelayanan Dasar)	Kab. Min	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional (DAK Kesehatan Pelayanan Dasar)		682.000.000	
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor (DAK Kesehatan Kefarmasian)	Kab. Min	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Min	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	1 Paket	274.500.000	
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor (DAK Tahun sebelumnya)	Kab. Min	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	1 Paket	243.944.000	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor (DAK Tahun sebelumnya)	Kab. Min	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	1 Paket	243.944.000	
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor (DAK Penugasan kesehatan Pengendalian Penyakit)	Kab. Min	Jumlah halaman gedung farmasi yang tertata	1 Paket	3.867.230.674	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor (DAK Penugasan kesehatan Pengendalian Penyakit)	Kab. Min	Jumlah halaman gedung farmasi yang tertata	1 Paket	3.867.230.674	
	Program Obat dan Pembekalan Kesehatan	Kab. Min	Cakupan Ketersediaan 97 Jenis Obat di Puskesmas sesuai standard obat generik nasional	95,00%	2.600.000.000	Program Obat dan Pembekalan Kesehatan		Cakupan Ketersediaan 97 Jenis Obat di Puskesmas sesuai standard obat generik nasional	95,00%		

	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kab. Min	Jumlah jenis obat dan perbekalan kesehatan yang tersedia	1 paket	100.000.000	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kab. Min	Jumlah jenis obat dan perbekalan kesehatan yang tersedia	1 paket	100.000.000	
	Pengadaan Obat dan Perbekalan kesehatan (DAK Kesehatan Kefarmasian)	Kab. Min	Jumlah jenis obat dan perbekalan kesehatan yang tersedia	1 paket	1.663.338.000	Pengadaan Obat dan Perbekalan kesehatan (DAK Kesehatan Kefarmasian)	Kab. Min	Jumlah jenis obat dan perbekalan kesehatan yang tersedia	1 paket	1.663.338.000	
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kab. Min	Jumlah puskesmas rawat inap dengan PONED	>10	3.711.040.986	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kab. Min	Jumlah puskesmas rawat inap dengan PONED	>10	3.711.040.986	
	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	Kab. Min	Jumlah orang yang menerima bantuan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	25 desa/ke	125.000.000	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	Kab. Min	Jumlah orang yang menerima bantuan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	25 desa/ke	125.000.000	
	Revitalisasi sistem Kesehatan	Kab. Min	Terlaksananya kegiatan revitalisasi system kesehatan	1 keg	29.120.000	Revitalisasi sistem Kesehatan	Kab. Min	Terlaksananya kegiatan revitalisasi system kesehatan	1 keg	29.120.000	
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Kab. Min	Jumlah tenaga jasa medic yang digunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	1 Paket	3.556.920.986	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Kab. Min	Jumlah tenaga jasa medic yang digunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	1 Paket	3.556.920.986	
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Kab. Min	Jumlah penanganan kasus keracunan obat	100%	210.052.000	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Kab. Min	Jumlah penanganan kasus keracunan obat	100%	210.052.000	
	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Kab. Min	Terlaksananya peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	1 paket	175.552.000	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Kab. Min	Terlaksananya peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	1 paket	175.552.000	
	Pengawasan Keamanan Pangan, Obat dan Bahan Berbahaya	Kab. Min	Terlaksananya kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan, Obat dan Bahan Berbahaya	1 paket	34.500.000	Pengawasan Keamanan Pangan, Obat dan Bahan Berbahaya	Kab. Min	Terlaksananya kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan, Obat dan Bahan Berbahaya	1 paket	34.500.000	
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Min	Rasio posyandu per satuan balita	1,26	800.000.000	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		Rasio posyandu per satuan balita	1,26		
	Pengembangan Media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Kab. Min	Tersedianya media promosi dan informasi sadar hidup sehat	1 paket	12.000.000	Pengembangan Media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Kab. Min	Tersedianya media promosi dan informasi sadar hidup sehat	1 paket	12.000.000	
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat		Prevalensi Stunting Balita	14%		Program Perbaikan Gizi Masyarakat		Prevalensi Stunting Balita	14%		
	Pemetaan Deteksi Dini Stunting dan Gizi Kurang	Kab. Min	Tersedianya data pemetaan gizi	1 dok	378.025.000	Pemetaan Deteksi Dini Stunting dan Gizi Kurang	Kab. Min	Tersedianya data pemetaan gizi	1 dok	378.025.000	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kab. Min			2.150.000.000	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit HIV/AIDS	100,00%		
	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular		Terlaksananya kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1 keg	59.120.000	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular		Terlaksananya kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1 keg	59.120.000	
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi	>5	29.120.000	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi	>5		
	Pembangunan dan Pemutakhiran Data dasar standar pelayanan kesehatan		Terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemutakhiran Data dasar standar pelayanan kesehatan	1 keg	29.120.000	Pembangunan dan Pemutakhiran Data dasar standar pelayanan kesehatan		Terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemutakhiran Data dasar standar pelayanan kesehatan	1 keg	29.120.000	
	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya		Ratio puskesmas, poliklinik, pustu/satuan penduduk	7,7	10.466.012.000	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya		Ratio puskesmas, poliklinik, pustu/satuan penduduk	7,7		

	Pembangunan Puskesmas Koya (Penambahan ruangan) (DAK Pelayanan Dasar)	Kec. Tondano Selatan	Terlaksananya Pembangunan Puskesmas Koya (Penambahan ruangan)	1 paket	3.200.000.000	Pembangunan Puskesmas Koya (Penambahan ruangan) (DAK Pelayanan Dasar)	Kec. Tondano Selatan	Terlaksananya Pembangunan Puskesmas Koya (Penambahan ruangan)	1 paket	3.200.000.000	
	Rehabilitasi Puskesmas Papakelan (DAK Pelayanan Dasar)	Kec. Tondano Timur	Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas Papakelan	1 paket	1.166.012.000	Rehabilitasi Puskesmas Papakelan (DAK Pelayanan Dasar)	Kec. Tondano Timur	Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas Papakelan	1 paket	1.166.012.000	
	Rehabilitasi Puskesmas Tandengan (DAK Pelayanan Dasar)	Kec. Eris	Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas Tandengan	1 paket	500.000.000	Rehabilitasi Puskesmas Tandengan (DAK Pelayanan Dasar)	Kec. Eris	Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas Tandengan	1 paket	500.000.000	
	Rumah Dinas Puskesmas Kombi (DAK Pelayanan Dasar)	Kec. Kombi	Terlaksananya pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Kombi	1 paket	600.000.000	Rumah Dinas Puskesmas Kombi (DAK Pelayanan Dasar)	Kec. Kombi	Terlaksananya pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Kombi	1 paket	600.000.000	
	Rumah Dinas Puskesmas Kawangkoan Barat (DAK Pelayanan Dasar)	Kec. Kawangkoan Barat	Terlaksananya pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Kawangkoan Barat	1 paket	600.000.000	Rumah Dinas Puskesmas Kawangkoan Barat (DAK Pelayanan Dasar)	Kec. Kawangkoan Barat	Terlaksananya pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Kawangkoan Barat	1 paket	600.000.000	
	Rumah Dinas Puskesmas Tanawangko (DAK Pelayanan Dasar)	Kec. Tombariri	Terlaksananya pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Tanawangko	1 paket	1.300.000.000	Rumah Dinas Puskesmas Tanawangko (DAK Pelayanan Dasar)	Kec. Tombariri	Terlaksananya pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Tanawangko	1 paket	1.300.000.000	
	IPAL Puskesmas Kawangkoan Barat (DAK Pelayanan Dasar)	Kec. Kawangkoan Barat	Tersedianya IPAL Puskesmas Kawangkoan Barat	1 paket	500.000.000	IPAL Puskesmas Kawangkoan Barat (DAK Pelayanan Dasar)	Kec. Kawangkoan Barat	Tersedianya IPAL Puskesmas Kawangkoan Barat	1 paket	500.000.000	
	IPAL Puskesmas Kombi (DAK Pelayanan Dasar)	Kec. Kombi	Tersedianya IPAL Puskesmas Kombi	1 paket	500.000.000	IPAL Puskesmas Kombi (DAK Pelayanan Dasar)	Kec. Kombi	Tersedianya IPAL Puskesmas Kombi	1 paket	500.000.000	
	IPAL Puskesmas Loloh (DAK Pelayanan Dasar)	Kec. Loloh	Tersedianya IPAL Puskesmas Loloh	1 paket	500.000.000	IPAL Puskesmas Loloh (DAK Pelayanan Dasar)	Kec. Loloh	Tersedianya IPAL Puskesmas Loloh	1 paket	500.000.000	
	IPAL Puskesmas Pineleng (DAK Pelayanan Dasar)	Kec. Pineleng	Tersedianya IPAL Puskesmas Pineleng	1 paket	500.000.000	IPAL Puskesmas Pineleng (DAK Pelayanan Dasar)	Kec. Pineleng	Tersedianya IPAL Puskesmas Pineleng	1 paket	500.000.000	
	IPAL Puskesmas Kakas (DAK Pelayanan Dasar)	Kec. Kakas	Tersedianya IPAL Puskesmas Kakas	1 paket	500.000.000	IPAL Puskesmas Kakas (DAK Pelayanan Dasar)	Kec. Kakas	Tersedianya IPAL Puskesmas Kakas	1 paket	500.000.000	
	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Mokupa	Kec. Mandolang	Terlaksananya rehab pustu Mokupa	1 paket	500.000.000	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Mokupa	Kec. Mandolang	Terlaksananya rehab pustu Mokupa	1 paket	500.000.000	
	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Suluan	Kec. Tombulu	Terlaksananya rehab pustu Suluan	1 paket	150.000.000	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Suluan	Kec. Tombulu	Terlaksananya rehab pustu Suluan	1 paket	150.000.000	
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan			> 80%	36.231.355.000	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan			> 80%	36.231.355.000	
	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Kab. Min	Terlaksananya kemitraan asuransi kesehatan	> 80%	36.231.355.000	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Kab. Min	Terlaksananya kemitraan asuransi kesehatan	> 80%	36.231.355.000	
	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia		Cakupan posyandu lansia (puskesmas)	20,00%	29.120.000	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia		Cakupan posyandu lansia (puskesmas)	20,00%	29.120.000	
	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Kab. Min	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan kesehatan	1 keg	29.120.000	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Kab. Min	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan kesehatan	1 keg	29.120.000	
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		Cakupan kunjungan ibu hamil K4	94,50%	29.120.000	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		Cakupan kunjungan ibu hamil K4	94,50%	29.120.000	
	Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Kab. Min	Terlaksananya kegiatan peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1 keg	29.120.000	Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak		Terlaksananya kegiatan peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1 keg	29.120.000	
	Program Akreditasi Puskesmas				2.896.143.565	Program Akreditasi Puskesmas				2.896.143.565	

	Akreditasi Puskesmas	Kab. Min	Puskesmas yang ter akreditasi	6 pkm akre dan 4 pkm re-akre	2.896.143.565	Akreditasi Puskesmas		Puskesmas yang ter akreditasi	6 pkm akre dan 4 pkm re-akre	2.896.143.565	
	Program Jaminan Persalinan		Persentase Ibu melahirkan yang mendapatkan Jampersal	>90%	712.405.000	Program Jaminan Persalinan		Persentase Ibu melahirkan yang mendapatkan Jampersal	>90%	712.405.000	
	Jaminan persalinan	Kab. Min	Jumlah ibu melahirkan yang mendapatkan jampersal	100%	712.405.000	Jaminan persalinan	Kab. Min	Jumlah ibu melahirkan yang mendapatkan jampersal	100%	712.405.000	
	Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)			100%	26.975.874.175	Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)			100%	26.975.874.175	
	BOK Puskesmas Kakas	Pkm Kakas	Jumlah Dana BOK yang diterima	100%	915.316.250	BOK Puskesmas Kakas	Pkm Kakas	Jumlah Dana BOK yang diterima	100%	915.316.250	
	BOK Puskesmas Lolah	Pkm Lolah	Jumlah Dana BOK yang diterima	100%	616.400.000	BOK Puskesmas Lolah	Pkm Lolah	Jumlah Dana BOK yang diterima	100%	616.400.000	
	BOK Puskesmas Sonder	Pkm Sonder	Jumlah Dana BOK yang diterima	100%	818.800.000	BOK Puskesmas Sonder	Pkm Sonder	Jumlah Dana BOK yang diterima	100%	818.800.000	
	BOK Puskesmas Tandengan	Pkm Tandengan	Jumlah Dana BOK yang diterima	100%	657.800.000	BOK Puskesmas Tandengan	Pkm Tandengan	Jumlah Dana BOK yang diterima	100%	657.800.000	
	BOK Puskesmas Tompaso	Pkm Tompaso	Jumlah Dana BOK yang diterima	100%	969.151.000	BOK Puskesmas Tompaso	Pkm Tompaso	Jumlah Dana BOK yang diterima	100%	969.151.000	
	BOK Puskesmas Papakelan	Pkm Papakelan	Jumlah Dana BOK yang diterima	100%	745.200.000	BOK Puskesmas Papakelan	Pkm Papakelan	Jumlah Dana BOK yang diterima	100%	745.200.000	
	BOK Puskesmas Kakas Barat	Pkm Kakas Barat	Jumlah Dana BOK yang diterima	100%	653.936.000	BOK Puskesmas Kakas Barat	Pkm Kakas Barat	Jumlah Dana BOK yang diterima	100%	653.936.000	
	BOK Puskesmas Seretan	Pkm Seretan	Jumlah Dana BOK yang diterima	100%	542.800.000	BOK Puskesmas Seretan	Pkm Seretan	Jumlah Dana BOK yang diterima	100%	542.800.000	
	BOK Puskesmas Kombi	Pkm Kombi	Jumlah Dana BOK yang diterima	100%	763.600.000	BOK Puskesmas Kombi	Pkm Kombi	Jumlah Dana BOK yang diterima	100%	763.600.000	
	BOK Puskesmas Koya	Pkm Koya	Jumlah Dana BOK yang diterima	100%	903.960.000	BOK Puskesmas Koya	Pkm Koya	Jumlah Dana BOK yang diterima	100%	903.960.000	
	BOK Puskesmas Tumaratas	Pkm Tumas	Jumlah Dana BOK yang diterima	100%	680.760.000	BOK Puskesmas Tumaratas	Pkm Tumas	Jumlah Dana BOK yang diterima	100%	680.760.000	
	BOK Puskesmas Kawangkoan Barat	Pkm Kawangkoan Barat	Jumlah Dana BOK yang diterima	100%	657.975.000	BOK Puskesmas Kawangkoan Barat	Pkm Kawangkoan Barat	Jumlah Dana BOK yang diterima	100%	657.975.000	
	BOK Puskesmas Kawangkoan	Pkm Kawangkoan	Jumlah Dana BOK yang diterima	100%	922.560.000	BOK Puskesmas Kawangkoan	Pkm Kawangkoan	Jumlah Dana BOK yang diterima	100%	922.560.000	
	BOK Puskesmas Manembo	Pkm Manembo	Jumlah Dana BOK yang diterima	100%	651.255.750	BOK Puskesmas Manembo	Pkm Manembo	Jumlah Dana BOK yang diterima	100%	651.255.750	
	BOK Puskesmas Tateli	Pkm Tateli	Jumlah Dana BOK yang diterima	100%	697.500.000	BOK Puskesmas Tateli	Pkm Tateli	Jumlah Dana BOK yang diterima	100%	697.500.000	
	BOK Puskesmas Tonselama	Pkm Tonselama	Jumlah Dana BOK yang diterima	100%	651.000.000	BOK Puskesmas Tonselama	Pkm Tonselama	Jumlah Dana BOK yang diterima	100%	651.000.000	

	BOK Puskesmas Remboken	Pkm Remboken	Jumlah Dana BOK yang diterima	100%	544.050.000	BOK Puskesmas Remboken	Pkm Remboken	Jumlah Dana BOK yang diterima	100%	544.050.000	
	BOK Puskesmas Pineleng	Pkm Pineleng	Jumlah Dana BOK yang diterima	100%	945.810.000	BOK Puskesmas Pineleng	Pkm Pineleng	Jumlah Dana BOK yang diterima	100%	945.810.000	
	BOK Puskesmas Tanawangko	Pkm Tanawangko	Jumlah Dana BOK yang diterima	100%	716.100.000	BOK Puskesmas Tanawangko	Pkm Tanawangko	Jumlah Dana BOK yang diterima	100%	716.100.000	
	BOK Puskesmas Walantakan	Pkm Walantakan	Jumlah Dana BOK yang diterima	100%	651.000.000	BOK Puskesmas Walantakan	Pkm Walantakan	Jumlah Dana BOK yang diterima	100%	651.000.000	
	BOK Puskesmas Wolaang	Pkm Wolaang	Jumlah Dana BOK yang diterima	100%	792.360.000	BOK Puskesmas Wolaang	Pkm Wolaang	Jumlah Dana BOK yang diterima	100%	792.360.000	
	BOK Puskesmas Tombulu	Pkm Tombulu	Jumlah Dana BOK yang diterima	100%	745.860.000	BOK Puskesmas Tombulu	Pkm Tombulu	Jumlah Dana BOK yang diterima	100%	745.860.000	
	BOK Dukungan Manajemen Dinas Kesehatan	Kab. Minahasa	Tersedianya Manajemen Dinas Kesehatan	1 dok	94.461.707	BOK Dukungan Manajemen Dinas Kesehatan	Kab. Minahasa	Tersedianya Manajemen Dinas Kesehatan	1 dok	94.461.707	
	BOK UKM Sekunder Dinas Kesehatan	Kab. Minahasa	Tersedianya UKM Sekunder Dinas Kesehatan	1 dok	1.609.164.296	BOK UKM Sekunder Dinas Kesehatan	Kab. Minahasa	Tersedianya UKM Sekunder Dinas Kesehatan	1 dok	1.609.164.296	
	BOK Distribusi Obat dan e-logistik	Kab. Minahasa	Tersedianya obat dan Logistik	1 dok	110.767.000	BOK Distribusi Obat dan e-logistik	Kab. Minahasa	Tersedianya obat dan Logistik	1 dok	110.767.000	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berdasarkan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maka beberapa usulan program dan kegiatan masyarakat, baik yang diperoleh dari proses musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten, serta hasil-hasil konsultasi publik terhadap rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan telaahan dokumen-dokumen perencanaan khususnya yang terkait dengan penanaman modal maka hasilnya dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kabupaten Minahasa

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Sosialisasi dan Penyuluhan	Kab. Minahasa	1 keg penyuluhan	1	diterima
2	Pengadaan alat fogging di desa	Kab. Minahasa	Alat fogging tersedia	5	Pengadaan dari dana desa
3	Pengadaan obat-obatan khusus Corona/desinfektan untuk desa	Kab. Minahasa			Diusahakan dalam penganggaran
4	Tenaga perawat yang menetap di Puskesmas	Kel. Masarang			Sudah ada jadwal petugas dari Puskesmas untuk pustu Masarang
5	Sosialisasi pencegahan penyakit menular	Kel. Masarang			Disesuaikan dengan kegiatan di dinkes
6	Penambahan tenaga paramedic/ bidan yang ada di Poskesdes	Desa Toliang kec. Kakas Barat			Sudah ada 2 bidan tapi pelayanan di Simbel
7	Penambahan tenaga bidan di Puskesmas	Puskesmas Tandengan			Tenaga bidan do puskesmas sudah mencukupi
8	Renovasi Pustu	Kab. Minahasa			Akan didiskusikan
9	Pemeliharaan gedung Puskesmas	Kab. Minahasa			Akan didiskusikan
10	Posyandu Lansia	Kec Langowan Utara		2	Diterima akan disampaikan kepada Puskesmas ybs

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi. Sasaran pembangunan kesehatan berdasarkan pada RPJMN Teknokratik 2020-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak;
2. Meningkatnya Status Gizi Masyarakat;
3. Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan faktor risiko penyakit tidak menular;
4. Meningkatnya kinerja sistem kesehatan & Meningkatnya pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas;
5. Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Seluruh Penduduk.

Arah Kebijakan adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dan peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Dengan Strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi;
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat;
3. Peningkatan pengendalian penyakit;
4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);
5. Peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.

Permasalahan kesehatan yang muncul di Kabupaten Minahasa, diantaranya yaitu :

1. Akses pelayanan dalam hal ini keterjangkauan dan ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan serta keterbatasan jumlah tenaga kesehatan;
2. Belum optimalnya penggunaan teknologi di bidang kesehatan dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi bidang kesehatan;
3. Angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu (AKI) melahirkan masih relative tinggi;
4. Masih adanya kasus penderita gizi buruk dan gizi kurang balita yang ditimbang;

5. Meningkatnya kejadian penyakit. Masih tingginya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular yang masih merupakan penyebab penyakit tertinggi.
6. Perilaku masyarakat kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, berdasarkan kondisi lingkungan dan permukiman sehat masih rendah.

Isu strategis pembangunan kesehatan di Kabupaten Minahasa berdasarkan RPJMD Kabupaten Minahasa adalah Terbatasnya sumberdaya dan pelayanan kesehatan, masih adanya ancaman penyakit menular dan terdapat penduduk yang belum menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan, Angka kematian ibu dan belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat

Telaahan terhadap kebijakan pembangunan kesehatan baik di tingkat pusat maupun provinsi, merupakan masukan bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tahun 2020, dimana baik kebijakan di tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten diharapkan memiliki sinergitas yang akurat, sehingga pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Minahasa dapat menyentuh sasaran yang tepat. Perlunya peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, disadari bahwa pengalaman empiris dan penelitian para ahli menunjukkan bahwa pembangunan kesehatan adalah esensial untuk peningkatan IPM. Penduduk yang sehat akan menjadi produktif, sehingga dapat meningkatkan pendapatan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan

Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2019-2023 disebutkan bahwa untuk **Meningkatkan Pembangunan Sumberdaya Manusia Yang Berbudaya Dan Berdaya Saing** (Misi 2) perlu Meningkatkan Pembangunan Kesehatan (Tujuan Misi 2). Untuk bisa menjadi berdaya saing maka Bupati Minahasa menetapkan sasaran yang akan dicapai salah satunya adalah “Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan”.

Berdasarkan sasaran diatas maka Dinas Kesehatan telah merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan Kesehatan di Kabupaten Minahasa antara lain:

1. Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat
2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
3. Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan
4. Meningkatnya Perlindungan Finansial, Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat serta Sumber Daya Kesehatan

3.3 Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2021

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud maka dirumuskan rencana program dan kegiatan tahun 2021 dan perkiraan maju tahun 2022, dengan rincian sebagaimana tabel 3.3.

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021
Dan Prakiraan Maju Tahun 2022
(sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	pagu Indikatif		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif
				Kinerja			Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
1	02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
1	02	01 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			50.951.177.986			
1	02	01 2.02 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50.951.177.986			
1	02	01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			45.129.339			
1	02	01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		39.477.610			
1	02	01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5.651.729			
1	02	01 2.06 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			54.116.100			
1	02	01 2.06 05 Pengadaan Mebel	Kab. Minahasa		54.116.100			
1	02	01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1	02	01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Minahasa		1.000.000			
1	02	01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Minahasa		63.207.000			
1	02	01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Minahasa		4.225.800.000			
1	02	01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			119.600.000			

1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		119.600.000		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		113.762.526.677		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas (DAK- Pelayanan Kesehatan Dasar)	Kab. Minahasa, Tondano Barat, Rinegetan Kab. Minahasa, Remboken, Leleko Kab. Minahasa, Tombulu, Kembes II Kab. Minahasa,	12.998.944.000		
1	02	02	2.01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan (DAK- Pelayanan Kesehatan Dasar)	Kawangkoan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa, Tombariri Timur, Lolah Kab. Minahasa	1.998.000.000		
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK- Pelayanan Kesehatan Dasar)		2.259.999.997		
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Dasar)	Kab. Minahasa	12.544.378.647		
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin (DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan)	Kab. Minahasa	1.459.801.820		
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai (DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan)	Kab. Minahasa	1.614.252.573		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (DAK Non Fisik)	Kab. Minahasa	1.004.538.000		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pkm Walantakan	643.904.674		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pkm Pineleng	1.160.000.000		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pkm Sonder	1.160.000.000		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pkm Tonsea lama	861.979.700		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pkm Tandengan	799.999.978		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pkm Tombulu	1.083.222.000		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pkm Kombi	777.584.064		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pkm Lembean Timur	481.905.952		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pkm Kakas Barat	791.755.700		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pkm Tumaratas	977.523.750		

1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pkm Tombariri	1.194.000.000		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pkm Papakelan	889.896.344		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pkm Kawangkoan	1.060.000.000		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pkm Remboken	900.000.000		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pkm Wolaang	1.070.906.400		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pkm Manembo	494.265.800		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pkm Kawangkoan Barat	562.716.000		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pkm Koya	1.600.000.000		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pkm Lolah	780.000.000		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pkm Kakas	906.882.816		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pkm Tateli	1.075.000.000		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pkm Tompasso	1.135.448.800		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesda)	Kab. Minahasa	39.278.813.804		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pkm Walantakan	651.000.000		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pkm Pineleng	940.000.000		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pkm Sonder	818.800.000		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pkm Tonsea lama	650.999.987		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pkm Tandengan	651.799.993		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pkm Tombulu	739.999.970		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pkm Kombi	723.763.380		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pkm Lembean Timur	534.306.250		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pkm Kakas Barat	653.936.000		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pkm Tumaratas	675.000.000		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pkm Tombariri	706.176.000		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pkm Papakelan	739.000.000		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pkm Kawangkoan	922.560.000		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pkm Remboken	544.050.000		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pkm Wolaang	785.000.000		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pkm Manembo	651.255.750		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pkm Kawangkoan Barat	656.998.914		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pkm Koya	890.000.000		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pkm Lolah	609.213.960		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pkm Kakas	909.999.206		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pkm Tateli	697.500.000		

1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pkm Tompaso	963.998.280		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Minahasa	2.623.826.406		
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (PMI)	Kab. Minahasa	200.000.000		
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa	1.257.621.762		

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MINAHASA,**



**Dr. MAYA CH. RAMBITAN, M.Kes
NIP. 19800304 200902 2 005**

Dasar pertimbangan perumusan program-program dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di tahun 2021 adalah dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan, pencapaian SPM, pendayagunaan potensi ekonomi daerah, pencapaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) khususnya SKPD Dinas Kesehatan Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan kesehatan tahun 2021 sebagai acuan bagi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi Dinas Kesehatan sebagai pelaksana program, Renja Tahun 2021 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2021 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran bidang kesehatan.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam Renja Tahun 2021 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu seluruh satker mulai membuat rencana aksi dalam upaya penggalan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari masyarakat ataupun dunia usaha. Mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan dengan perjanjian kerjasama. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan.

Pelaksanaan kegiatan Renja harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar perangkat daerah, perangkat daerah dengan kabupaten/kota maupun perangkat daerah dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi

dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip *safe guarding* akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan kesehatan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan kesehatan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan kesehatan.

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Dinas Kesehatan Tahun 2019 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rencana kerja berupa program dan kegiatan sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2021 dan prakiraan maju Tahun 2022 disajikan pada Tabel 3.3 diatas. Penyajian program dan kegiatan

dilakukan berdasarkan RKPD tahun 2021 yang sudah ditetapkan. Sasaran Dinas Kesehatan berdasarkan Arah kebijakan tahun 2021 dalam RPJMD adalah meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat, meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular, meningkatnya perlindungan finansial, dan meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan. Untuk mencapai sasaran tersebut, strategi yang dilakukan adalah Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas, mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat, meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan rujukan yang Berkualitas, Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan dan Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan.

BAB IV PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) SKPD Kabupaten Minahasa menjadi acuan dalam rangka penyempurnaan rancangan RKPD serta menjadi acuan dalam rangka penyempurnaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Dalam hal anggaran daerah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah sesuai rencana Kerja maka penetapan program dan kegiatan sesuai ketersediaan anggaran atau pagu yang ditetapkan tetap mengacu pada program dan kegiatan dalam Renja yang ditetapkan. Untuk penyempurnaan rancangan Renja maka program dan kegiatan didasarkan pada rancangan Renja, kecuali kalau ada kebijakan nasional atau daerah yang memungkinkan terjadinya penetapan program dan kegiatan di luar Renja.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa sebagai salah satu Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa.

Semoga Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa tahun 2021 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Minahasa. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Tondano, Oktober 2020
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Minahasa



Dr. Maya C. Rambitan, M.Kes
Pembina
NIP. 19800304 200902 2 005